Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 393 – 398

RESEARCH ARTICLE

Dampak Pendudukan Jepang terhadap Arah Pergerakan Nasional di Kawasan Indocina

Alya Fatika Putri[1], Rizka Ayu Saraswati [2], Anggun Rienata[3] , Yuni Putri Gusmaini[4]
Universitas Jambi, Indonesia

alyafatika589@gmail.com[1], rizkaayyusaras17@gmail.com[2],
anggunrienata@gmail.com[3], yunitapurtrigusmaini51667@gmail.com[4]

Kata Kunci:
Pendudukan Jepang, Indocina, Pergerakan Nasional, Viet Minh, Kelaparan 1945, Revolusi Agustus

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak pendudukan militer Kekaisaran Jepang (1940–1945) terhadap dinamika dan arah pergerakan nasional di kawasan Indocina, khususnya Vietnam. Berbeda dengan wilayah Asia Tenggara lainnya, Jepang pada awalnya menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung dengan mempertahankan administrasi kolonial Prancis Vichy. Melalui metode sejarah yang bertumpu pada studi kepustakaan, kajian ini menganalisis literatur yang relevan dengan menggunakan pendekatan struktural dan multidimensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi Jepang yang masif, sistem kuota pangan, dan alih fungsi lahan pertanian memicu krisis kemanusiaan berupa Bencana Kelaparan 1944–1945. Krisis sosial-ekonomi ini menjadi katalisator penting yang meruntuhkan legitimasi kolonial Prancis dan otoritas militer Jepang di mata rakyat akar rumput. Di tengah penderitaan tersebut dan kevakuman kekuasaan pasca-kudeta militer Jepang pada Maret 1945, kelompok elite tradisional seperti Kaisar Bao Dai gagal mempertahankan dominasi politiknya. Sebaliknya, Liga Kemerdekaan Vietnam (Viet Minh) di bawah pimpinan Ho Chi Minh berhasil memanfaatkan momentum penderitaan rakyat untuk mengonsolidasikan kekuatan massa. Puncak dari dinamika ini adalah keberhasilan Viet Minh dalam memimpin Revolusi Agustus 1945. Kesimpulannya, pendudukan Jepang secara fundamental telah mengubah arah sejarah Indocina dengan mempercepat radikalisasi pergerakan nasional dan memfasilitasi transisi menuju kemerdekaan.

Key Word:
Japanese Occupation, Indochina, National Movement, Viet Minh, 1945 Famine, August Revolution

Abstract

This research examines the impact of the Japanese Empire's military occupation (1940–1945) on the dynamics and direction of the national movement in Indochina, specifically Vietnam. Unlike other Southeast Asian regions, Japan initially implemented an indirect rule system by retaining the Vichy French colonial administration. Utilizing a historical method based on a literature review, this study analyzes relevant literary sources using a structural and multidimensional approach. The results show that massive Japanese economic exploitation, forced food quotas, and agricultural land conversion triggered a humanitarian crisis in the form of the 1944–1945 Great Famine. This socio-economic crisis became a crucial catalyst that shattered the legitimacy of both French colonialism and Japanese military authority among the grassroots. Amidst this suffering and the power vacuum following the Japanese military coup in March 1945, traditional elite groups like Emperor Bao Dai failed to maintain their political dominance. Conversely, the League for the Independence of Vietnam (Viet Minh) under Ho Chi Minh successfully utilized the momentum of public suffering to consolidate mass support. The pinnacle of this dynamic was the Viet Minh's success in leading the August Revolution of 1945. In conclusion, the Japanese occupation fundamentally altered the course of Indochina's history by accelerating the radicalization of the national movement and facilitating the transition toward independence.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah strategis yang menjadi pusat ambisi ekspansi Kekaisaran Jepang selama Perang Pasifik (1941–1945) di bawah doktrin "Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Di antara berbagai wilayah pendudukan, Indocina Prancis menempati posisi yang unik secara geopolitik dan administratif. Berbeda dengan wilayah lain yang langsung ditaklukkan, Jepang awalnya memilih kebijakan ko-eksistensi pragmatis dengan rezim Prancis Vichy untuk mengamankan jalur logistik tanpa harus melakukan konfrontasi militer terbuka. Namun, stabilitas semu ini justru menyimpan dinamika eksploitasi yang sangat destruktif bagi masyarakat lokal.

Dampak paling krusial dari pendudukan Jepang di Indocina bukan hanya terlihat pada pergeseran peta militer, melainkan pada krisis kemanusiaan luar biasa yang terjadi menjelang akhir perang. Kebijakan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

ekstraksi ekonomi yang agresif, sistem kuota pangan paksa, serta alih fungsi lahan pertanian menjadi perkebunan industri militer memicu Bencana Kelaparan 1944-1945 yang merenggut jutaan nyawa rakyat Vietnam. Tragedi ini menjadi katalisator yang mengubah penderitaan massa menjadi kemarahan politik, yang secara fundamental meruntuhkan legitimasi kekuasaan kolonial Prancis maupun otoritas militer Jepang di mata rakyat. Di tengah situasi tersebut, terjadi pergeseran arah pergerakan nasional yang sangat signifikan. Kelompok elite tradisional seperti Kaisar Bao Dai terjebak dalam dilema politik antara mempertahankan monarki di bawah kendali Jepang atau mendukung arus revolusi. Di sisi lain, kemunculan LigaKemerdekaan Vietnam (*Viet Minh*) di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh menawarkan narasi perjuangan yang lebih inklusif dan radikal. Viet Minh secara cerdik memanfaatkan kekecewaan rakyat terhadap kegagalan distribusi pangan dan kekosongan kekuasaan pasca-kudeta Maret 1945 untuk mengonsolidasikan kekuatan nasionalisme modern.

Meskipun kajian mengenai Perang Dunia II di Asia Tenggara telah banyak dilakukan, fokus pada keterkaitan langsung antara krisis pangan sistematis dengan akselerasi radikalisasi pergerakan nasional di Indocina masih memerlukan pendalaman lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan militer dan ekonomi Jepang di Indocina tidak hanya mengubah struktur politik kawasan, tetapi juga menciptakan kondisi sosial-ekonomi yang memungkinkan Viet Minh memenangkan dukungan massa melalui Revolusi Agustus 1945. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai proses dekolonisasi di Vietnam yang penuh dengan kompleksitas ideologis dan perjuangan rakyat akar rumput.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical method*) dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengkaji dampak pendudukan Jepang terhadap arah pergerakan nasional di kawasan Indocina, khususnya Vietnam pada periode 1940–1945. Metode sejarah dipilih karena penelitian ini berfokus pada rekonstruksi peristiwa masa lalu berdasarkan sumber-sumber sejarah yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang digunakan bersifat struktural dan multidimensional, sehingga memungkinkan analisis dilakukan tidak hanya dari aspek politik dan militer, tetapi juga dari sisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang memengaruhi dinamika pergerakan nasional.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber sekunder berupa buku sejarah, artikel jurnal ilmiah, dokumen akademik, dan literatur yang berkaitan dengan Perang Dunia II di Asia Tenggara, pendudukan Jepang di Indocina, krisis kelaparan Vietnam 1944–1945, serta perkembangan gerakan nasional Viet Minh. Literatur utama yang digunakan antara lain karya D.G.E. Hall, Nicholas Tarling, Bernard B. Fall, William J. Duiker, David G. Marr, Gregg Huff, dan Pierre Brocheux yang membahas sejarah politik dan sosial Indocina pada masa kolonial hingga pendudukan Jepang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri berbagai referensi dari perpustakaan, jurnal daring, serta sumber akademik terpercaya. Setelah data terkumpul, penelitian dilaksanakan melalui empat tahapan metode sejarah, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Tahap heuristik dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber yang relevan dengan tema penelitian, baik berupa buku, artikel ilmiah, maupun hasil penelitian terdahulu. Tahap berikutnya adalah kritik sumber yang meliputi kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menilai keaslian dan validitas sumber, sedangkan kritik internal bertujuan menilai kredibilitas isi sumber serta membandingkan berbagai informasi guna menghindari bias sejarah.

Selanjutnya, pada tahap interpretasi, fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi dianalisis untuk menemukan hubungan sebab-akibat antara kebijakan pendudukan Jepang dengan perubahan arah pergerakan nasional di Indocina. Analisis difokuskan pada dampak eksploitasi ekonomi Jepang, krisis kelaparan 1944–1945, serta kondisi kevakuman kekuasaan pasca-kudeta Jepang terhadap bangkitnya dukungan rakyat kepada Viet Minh di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh.

Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu penyusunan hasil penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis, kronologis, dan deskriptif-analitis. Pada tahap ini, seluruh hasil interpretasi dirangkai menjadi narasi sejarah yang menjelaskan bagaimana pendudukan Jepang berkontribusi terhadap percepatan radikalisasi gerakan nasional dan lahirnya Revolusi Agustus 1945 di Vietnam.

Heuristik (Pengumpulan Sumber)

Tahap ini difokuskan pada pengumpulan sumber-sumber tertulis, khususnya sumber sekunder berupa buku teks, literatur akademis, dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan fokus kajian. Pengumpulan data

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

dilakukan dengan menelusuri literatur yang membahas dinamika kawasan Asia Tenggara pada masa Perang Dunia II, khususnya mengenai Indocina, seperti karya D.G.E. Hall, Nicholas Tarling, serta penelitian spesifik mengenai Bencana Kelaparan 1945 oleh Gregg Huff.

Kritik Sumber (Verifikasi)

Setelah sumber terkumpul, dilakukan proses kritik yang meliputi kritik ekstern (menilai otentisitas fisik sumber) dan kritik intern (menilai kredibilitas dan keabsahan informasi di dalam sumber). Pada tahap ini, peneliti membandingkan data dari berbagai literatur—misalnya menyilangkan data antara catatan sejarah militer Jepang dan laporan kondisi sosial ekonomi masyarakat Vietnam untuk menghindari bias sejarah dan memastikan validitas narasi mengenai eksploitasi dan pergerakan Viet Minh.

Interpretasi (Penafsiran)

Fakta-fakta sejarah yang telah diverifikasi kemudian dirangkai dan dianalisis untuk mencari keterkaitan sebab-akibat (kausalitas). Interpretasi difokuskan pada bagaimana kebijakan eksploitasi ekonomi dan kudeta militer Jepang pada Maret 1945 secara langsung memicu penderitaan sosial (kelaparan massal) dan kekosongan kekuasaan, yang pada gilirannya mempercepat radikalisasi serta konsolidasi gerakan perlawanan nasionalis di bawah pimpinan Viet Minh.

Historiografi (Penulisan Sejarah)

Tahap terakhir adalah menyajikan hasil interpretasi tersebut ke dalam bentuk tulisan sejarah yang sistematis, logis, dan kronologis. Penulisan artikel jurnal ini disusun dengan gaya deskriptif-analitis, memaparkan secara runtut mulai dari kedatangan militer Jepang, dampak kebijakan ekonomi terhadap masyarakat akar rumput, manuver elite lokal, hingga meletusnya Revolusi Agustus 1945 sebagai puncak arah pergerakan nasional Indocina.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendudukan Jepang di kawasan Indocina pada periode 1940–1945 membawa perubahan besar terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial masyarakat Vietnam. Berbeda dengan pola pendudukan Jepang di wilayah Asia Tenggara lain seperti Indonesia atau Malaya yang dilakukan melalui pengambilalihan pemerintahan kolonial secara langsung, Jepang di Indocina pada awalnya memilih mempertahankan administrasi kolonial Prancis Vichy. Kebijakan ini dilakukan karena Jepang lebih mengutamakan kepentingan strategis militer dan logistik dibandingkan penguasaan administratif secara penuh. Namun, meskipun pemerintahan kolonial Prancis masih dipertahankan secara formal, kendali politik dan militer sesungguhnya berada di tangan Jepang. Situasi ini menciptakan sistem kekuasaan ganda yang justru memperburuk kondisi masyarakat lokal.

Secara geopolitik, Indocina memiliki posisi strategis bagi Jepang karena wilayah tersebut menjadi jalur penting menuju Tiongkok dan Asia Tenggara. Jepang memanfaatkan pelabuhan, jalur kereta api, dan pangkalan udara di Vietnam sebagai basis ekspansi militer ke Malaya, Filipina, dan Hindia Belanda. Dalam praktiknya, kebijakan militer Jepang di Indocina tidak hanya bertujuan memperkuat pertahanan perang, tetapi juga mengintegrasikan ekonomi kawasan ke dalam kepentingan perang Asia Timur Raya. Jepang memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia demi mendukung kebutuhan militernya yang terus meningkat selama Perang Pasifik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi ekonomi merupakan faktor utama yang memicu perubahan arah pergerakan nasional di Vietnam. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang yang sangat menekan masyarakat. Produksi pangan dipusatkan untuk memenuhi kebutuhan tentara Jepang, sementara rakyat dipaksa menyerahkan hasil panen melalui sistem kuota wajib. Petani tidak lagi memiliki kebebasan menentukan distribusi hasil pertanian mereka karena sebagian besar produksi beras harus diserahkan kepada pemerintah pendudukan dengan harga murah. Kebijakan ini menyebabkan masyarakat desa kehilangan cadangan pangan untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, Jepang juga memaksa petani mengganti tanaman pangan dengan tanaman industri seperti kapas, rami, dan jarak yang dibutuhkan untuk kepentingan perang. Alih fungsi lahan tersebut berdampak langsung terhadap penurunan produksi pangan di Vietnam bagian utara. Situasi semakin memburuk ketika terjadi bencana alam berupa banjir dan gagal panen pada 1944. Dalam kondisi normal, suplai beras dari Vietnam selatan sebenarnya dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan wilayah utara. Akan tetapi, sistem transportasi pada masa pendudukan sepenuhnya diprioritaskan untuk kepentingan militer Jepang sehingga distribusi bahan pangan tidak berjalan efektif.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Akibat kebijakan eksploitasi tersebut, Vietnam mengalami krisis kemanusiaan besar berupa Kelaparan 1944–1945. Penelitian ini menemukan bahwa kelaparan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam, tetapi merupakan dampak langsung dari kebijakan ekonomi perang Jepang. Jutaan masyarakat kehilangan akses terhadap bahan makanan, sementara pemerintah kolonial Prancis maupun Jepang gagal memberikan solusi nyata. Banyak penduduk desa terpaksa meninggalkan kampung halaman untuk mencari makanan di kota-kota besar, tetapi justru menghadapi kondisi yang sama buruknya. Fenomena kematian massal akibat kelaparan menjadi simbol runtuhnya legitimasi kekuasaan kolonial di mata rakyat Vietnam.

Kondisi sosial yang semakin memburuk tersebut memicu perubahan kesadaran politik masyarakat. Sebelum pendudukan Jepang, pergerakan nasional Vietnam masih terpecah dalam berbagai kelompok dengan ideologi yang berbeda-beda, mulai dari kelompok nasionalis moderat hingga kelompok komunis revolusioner. Namun, penderitaan akibat eksploitasi Jepang menciptakan kesamaan nasib yang mendorong masyarakat untuk mendukung gerakan yang dianggap paling mampu memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, Viet Minh berhasil tampil sebagai kekuatan politik yang memperoleh dukungan luas dari masyarakat akar rumput.

Viet Minh yang dipimpin oleh Ho Chi Minh memanfaatkan situasi krisis untuk membangun legitimasi politik. Organisasi ini tidak hanya mengusung agenda kemerdekaan nasional, tetapi juga secara aktif membantu masyarakat yang terkena dampak kelaparan. Viet Minh melakukan berbagai tindakan populis seperti membagikan beras, menyerukan perlawanan terhadap penimbunan pangan, dan mengambil alih lumbung-lumbung beras milik Jepang. Tindakan tersebut membuat Viet Minh dipandang sebagai organisasi yang benar-benar hadir di tengah penderitaan rakyat.

Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan Viet Minh tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ideologi, tetapi juga oleh kemampuan mereka membaca kondisi sosial masyarakat. Ho Chi Minh menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan harus dikaitkan dengan kebutuhan konkret rakyat, terutama persoalan pangan dan keselamatan hidup. Oleh karena itu, Viet Minh membangun propaganda yang menempatkan Jepang dan kolonialisme Prancis sebagai penyebab utama penderitaan rakyat Vietnam. Strategi tersebut efektif dalam meningkatkan dukungan massa, terutama di wilayah pedesaan yang paling terdampak kelaparan.

Selain faktor ekonomi dan sosial, perubahan arah pergerakan nasional juga dipengaruhi oleh dinamika politik internasional menjelang akhir Perang Dunia II. Pada Maret 1945, Jepang melancarkan kudeta terhadap pemerintahan kolonial Prancis di Indocina. Kudeta ini dilakukan karena Jepang khawatir Prancis akan berbalik mendukung Sekutu. Akibatnya, struktur administrasi kolonial Prancis runtuh dalam waktu singkat dan menciptakan kevakuman kekuasaan di berbagai wilayah Vietnam.

Pasca-kudeta, Jepang berusaha memperoleh dukungan rakyat dengan membentuk pemerintahan lokal di bawah Kaisar Bao Dai. Jepang memproklamasikan "kemerdekaan" Vietnam dan menunjuk Tran Trong Kim sebagai perdana menteri. Namun, pemerintahan tersebut tidak memiliki kekuatan nyata karena tetap berada di bawah kontrol militer Jepang. Di sisi lain, masyarakat Vietnam mulai kehilangan kepercayaan terhadap kelompok elite tradisional yang dianggap gagal melindungi rakyat selama masa krisis.

Kelemahan pemerintahan Bao Dai menjadi keuntungan besar bagi Viet Minh. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945, situasi politik Vietnam berada dalam keadaan kosong kekuasaan. Viet Minh bergerak cepat mengambil alih kota-kota penting seperti Hanoi dan Hue sebelum pasukan Sekutu tiba. Dukungan masyarakat terhadap Revolusi Agustus tidak terlepas dari pengalaman penderitaan selama masa pendudukan Jepang. Rakyat melihat Viet Minh sebagai simbol perjuangan nasional yang mampu menghadirkan harapan baru setelah bertahun-tahun mengalami penindasan kolonial dan krisis kemanusiaan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendudukan Jepang secara tidak langsung mempercepat proses dekolonisasi di Vietnam. Sebelum 1940, kolonialisme Prancis masih memiliki legitimasi politik yang cukup kuat melalui dukungan birokrasi dan elite lokal. Akan tetapi, kebijakan Jepang menghancurkan stabilitas kolonial tersebut. Jepang tidak hanya melemahkan kekuatan militer Prancis, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya kekuatan nasionalis baru yang lebih radikal dan terorganisasi.

Dalam konteks ini, Revolusi Agustus 1945 menjadi titik balik penting dalam sejarah Vietnam. Revolusi tersebut bukan sekadar momentum pergantian kekuasaan, melainkan puncak dari akumulasi penderitaan sosial, krisis ekonomi, dan perubahan kesadaran politik masyarakat selama masa pendudukan Jepang. Viet Minh berhasil memanfaatkan momentum tersebut untuk mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Vietnam pada 2 September 1945 di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh.

Selain mempercepat kemerdekaan Vietnam, pendudukan Jepang juga mengubah pola perjuangan nasional di kawasan Indocina secara lebih luas. Sebelum Perang Dunia II, gerakan nasional di Asia Tenggara

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

umumnya masih bergerak melalui jalur diplomasi dan organisasi politik moderat. Namun, pengalaman pendudukan Jepang menunjukkan bahwa kekuatan kolonial Eropa dapat dikalahkan melalui mobilisasi massa dan perjuangan bersenjata. Pengalaman ini kemudian memengaruhi munculnya gerakan-gerakan revolusioner di berbagai negara Asia Tenggara pasca-1945.

Penelitian ini memperlihatkan bahwa pendudukan Jepang memiliki dampak paradoksal terhadap Vietnam. Di satu sisi, Jepang datang dengan propaganda pembebasan Asia dari kolonialisme Barat melalui slogan "Asia untuk Asia". Akan tetapi, dalam praktiknya Jepang justru menerapkan eksploitasi ekonomi yang lebih keras dan menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat. Di sisi lain, kebijakan Jepang secara tidak langsung menciptakan kondisi yang memungkinkan tumbuhnya nasionalisme radikal dan mempercepat lahirnya negara Vietnam merdeka.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perubahan arah pergerakan nasional di Indocina tidak dapat dipahami hanya dari aspek politik semata. Faktor ekonomi, sosial, dan kemanusiaan memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dinamika perjuangan nasional. Krisis kelaparan 1944–1945 menjadi bukti bahwa penderitaan rakyat dapat berubah menjadi kekuatan politik yang mendorong lahirnya revolusi. Dalam konteks tersebut, Viet Minh berhasil memanfaatkan momentum sejarah untuk mengonsolidasikan dukungan rakyat dan mengambil alih kepemimpinan perjuangan nasional Vietnam.

Secara keseluruhan, pendudukan Jepang telah menjadi katalisator utama perubahan sejarah Indocina. Kebijakan eksploitasi ekonomi, kehancuran legitimasi kolonial Prancis, munculnya kevakuman kekuasaan, serta keberhasilan Viet Minh memobilisasi massa membentuk rangkaian peristiwa yang mengarah pada Revolusi Agustus 1945. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya dominasi kolonial di Vietnam, tetapi juga membuka babak baru perjuangan dekolonisasi di Asia Tenggara pada abad ke-20.

KESIMPULAN

Pendudukan Jepang di Indocina pada periode 1940–1945 membawa dampak besar terhadap perubahan arah pergerakan nasional di Vietnam melalui eksploitasi ekonomi, krisis sosial, dan kehancuran legitimasi kolonial Prancis. Kebijakan ekonomi perang Jepang seperti sistem kuota pangan paksa, alih fungsi lahan pertanian, dan monopoli distribusi logistik memicu Bencana Kelaparan 1944–1945 yang menyebabkan penderitaan massal rakyat Vietnam. Kondisi tersebut mempercepat tumbuhnya kesadaran nasionalisme radikal dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap Viet Minh di bawah kepemimpinan Ho Chi Minh. Di tengah kevakuman kekuasaan pasca-kudeta Jepang terhadap Prancis pada Maret 1945 dan menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada Agustus 1945, Viet Minh berhasil memanfaatkan momentum politik untuk memimpin Revolusi Agustus dan memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Dengan demikian, pendudukan Jepang tidak hanya melemahkan kolonialisme Eropa di Indocina, tetapi juga menjadi katalisator utama percepatan perjuangan kemerdekaan dan lahirnya Vietnam modern.

DAFTAR REFERENSI

Agung, I. A. A. G. (1989). *Sejarah Asia Tenggara: Pergolakan dan dinamika*. Yayasan Pustaka Nusantara.

Brocheux, P., & Hémery, D. (2009). *Indochina: An ambiguous colonization, 1858–1954*. University of California Press.

Duiker, W. J. (2000). *Ho Chi Minh: A life*. Hyperion.

Fall, B. B. (1967). *The two Viet-Nams: A political and military analysis* (2nd rev. ed.). Frederick A. Praeger.

Gunn, G. (2011). Kelaparan besar Vietnam 1944–1945 ditinjau kembali. *Asia-Pacific Journal*, 1–15.

Hall, D. G. E. (1988). *Sejarah Asia Tenggara* (I. P. Soewarsha, Trans.). Usaha Nasional.

Huff, G. (2018). Penyebab dan dampak kelaparan besar Vietnam 1944–1945. *The Economic History Review, 72*, 1–25.

Huff, G. (2019). Kelaparan besar Vietnam dan Jawa pada Perang Dunia Kedua. *Modern Asian Studies, 54*(2), 1–36.

Lockhart, G. (1989). *Nation in arms: The origins of the People's Army of Vietnam*. Allen & Unwin.

Marr, D. G. (1995). *Vietnam 1945: The quest for power*. University of California Press.

Oktorino, N. (2013). *Konflik bersejarah: Runtuhnya Hindia Belanda dan ancaman Kemaharajaan Jepang*. Elex Media Komputindo.

Rasyidi, O. (2014). *Manusia perahu (Kajian historis terhadap kehidupan pengungsi Vietnam di Pulau Galang 1979–1996)* [Skripsi sarjana, Universitas Pendidikan Indonesia]. Repository Universitas Pendidikan Indonesia.

Sardiman. (1983). *Sejarah perjuangan kemerdekaan Vietnam*. Penerbit Liberty.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Smith, J. L. (2015). Tahun-tahun sulit: Mendefinisikan dan mengelola kelaparan 1944–1947. *History and Technology*, *31*(3), 206–219.

Suryadinata, L. (1998). *Politik luar negeri dan dinamika kawasan Asia Pasifik*. LP3ES.

Tarling, N. (Ed.). (1999). *The Cambridge history of Southeast Asia: Volume 2* (Edisi terjemahan bahasa Indonesia). Yayasan Obor Indonesia.

Van der Eng, P. (2020). Peraturan dan pengendalian: Menjelaskan penurunan produksi pangan di Jawa 1940–1946 dan kelaparan 1944–1945. *Lembaran Sejarah, 16*(1), 3–24.